BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan Internasional dapat didefinisikan sebagai studi hubungan dan interaksi antara negara-negara, termasuk aktivitas dan kebijakan pemerintah,organisasi internasional,organinasi non pemerintah dan perusahaan multinasional. Hubungan internasional dapat berupa subjek teoritis dan subjek praktis atau subjek kebijakan dan pendekatan akademis terhadapnya dapat bersifat empiris atau normatif atau keduanya. Hubungan Internasional sering dianggap sebagai cabang ilmu politik tetapi juga merupakan subjek yang dipelajari pakar sejarah (sejarah internasional atau sejarah diplomatik), Hubungan Internasional merupakan bidang studi ilegal (hukum internasional publik) dan bidang filsafat (etika internasional). Dari perspektif yang lebih luas tersebut, Hubungan Internasional jelas merupakan *inquiry* (riset empiris) interdisipliner Aspek Hubungan Internasional terutama perang dan diplomasi,telah diteliti dngan cermat dan dipuji paling tidak sejak Thucydides sejarawan Yunani kuno,tetapi Hubungan Internasional hanya menjadi disiplin akademik yang tepat di awal abad ke-20 (Jackson dan Sorensen, 2013:4).

Pada tahun 1392, Jenderal Lee, Sung-gye mendirikan dinasti baru yang disebut Joseon. Para raja awal dinasti Joseon mengambil ajaran Konfucu sebagai filsafat dinasti untuk melawan agama Budha yang memberikan pengaruh dominan

Pada zaman dinasti Goryeo. Para penguasa dari dinasti Joseon memerintah dinastinya melalui sistem politik yang sangat stabil. Sistim ‘Gwageo’ merupakan sebuah sistem yang memilih pamong-praja melalui pengujian yang disebut ‘Gwageo’ dan sistim tersebut merupakan pondasi gerakan-gerakan intelektual pada zaman dinasti Joseon. Raja Sejo (1455-1468) menyusun sistem perhukuman dan mulai menerbitkan Gyeongguk Daejeon, ikhtisar peraturan perundang-undangan guna memperkokoh sistem pemerintahan dinasti Joseon. Selanjutnya pada zaman Raja Seongjong (1469-1494), penerbitan Gyeongguk Daejeon disempurnakan sehingga sistem pemerintahan dinasti Joseon semakin diperkokoh. Pada tahun 1592, Jepang menyerang pada dinasti Joseon Ekploitasi ekonomi Jepang selama masa penjajahan, tetap berlanjut. Oleh karena itu kehidupan masyarakat Korea memburuk sampai saat negara Jepang dikalahkan dalam Perang Dunia II, pada tahun 1945 (Kementerian Budaya, Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan,2012:203).

Awal Korea yang dibebaskan dari pendudukan Jepang pada Agustus tahun 1945. pembebasan ini bagaimanapun membawa kemerdekaan untuk Korea. Menurut ketentuan penyerahan Jepang, Korea dibagi pada paralel ke-38. paralel ke-38 adalah sebuah lingkaran lintang imajiner yang berada pada lintang 38 derajat sebelah utara garis khatulistiwa Bumi. Paralel ke-38 sangat penting dalam sejarah Korea. Paralel ke-38 ini pertama kali diusulkan sebagai garis pemisah untuk Korea pada tahun 1902 (Palka dan Galgano, 2004:59).

Korea yang terbagi menjadi dua negara yaitu Korea Selatan dan Korea Utara mempunyai ideologi berbeda dimana pihak Korea Selatan yang berada

dibawah pengaruh Amerika Serikat mengembangkan paham liberal-kapitalis, sedangkan Korea Utara dibawah pengaruh Uni Soviet yang mengembangkan paham sosialis-komunis. Pada tahun 1953 hal tersebut membuat hubungan kedua korea ini sangat tidak harmonis, upaya agar kedua korea ini berdamai pun dimulai dengan saling membuka komunikasi dan hubungan baik antar korea dan hubungan antar korea ini tidak lagi hanya sekedar permusuhan saja namun lebih berorientasi pada kerjasama reunifikasi Korea.

Pada 25 Juni 1950, menandai awal perang Korea Setelah tiga tahun pertempuran yang intens dan perkenalan dari Tiongkok di sisi lain dari Korea Utara sebuah gencatan senjata ditandatangani pada bulan Juli 1953. gencatan senjata tersebut untuk mempertahankan paralel utara ke-38, namun membentuk zona demiliterisasi di sepanjang perbatasan, Ada banyak perdebatan penyebab perang Korea dan apa yang mendorong serangan Korea Utara, Interpretasi berasal dari bantuan terbatas yang diberikan oleh negara-negara bersatu untuk Korea Selatan setelah tahun 1948. Uni Soviet dan Korea Utara merasa Amerika Serikat tidak akan campur tangan jika invansi diluncurkan (Palka dan Galgano,2004:59).

Asumsi ini adalah sebagai salah perhitungan yang jelas setelah perang Korea, Korea Utara dan Korea Selatan yang tidak memiliki kontak langsung sampai tahun 1971. Selama tahun 1970 kedua belah pihak bekerja ke arah mencapai kesepakatan tentang isu reunifikasi tapi tidak ada yang konkret bisa disepakati kecuali tiga prinsip utama reunifikasi: kemerdekaan, persatuan nasional perdamaian pada tahun 1992 akhirnya kedua negara menandatangani perjanjian non-agresi, dan pertemuan puncak itu dijadwalkan untuk 1994 tapi itu dibatalkan

menyusul kematian Kim Il sung (Palka dan Galgano,2004:60).

Setelah kematian Kim Il sung dan bangkitnya kekuatan kim Jong Il, Korea Utara memasuki masa ketidakpastian politik. Kim Jong Il telah membuat beberapa penampilan publik dan tidak pernah berbicara kepada masyarakatnya secara publik. Peristiwa seperti kekeringan berkepanjangan diikuti oleh banjir telah menghancurkan produksi pertanian Korea Utara. Hilangnya dukungan dari Tiongkok telah menciptakan pengurangan besar dalam industri di Korea Utara, Korea Utara mulai untuk melihat ke luar dan salah satu langkah positif pertama menuju reunifikasi datang pada tahun 2000 dan yang pertama dari beberapa zona perdagangan di bagian Korea Utara mencoba untuk membangkitkan lagi ekonomi dan mendorong investasi asing (Palka dan Galgano, 2004:60).

Keinginan dari presiden Kim Jong Il menekankan perlunya meningkatkan dan mengembangkan perdagangan luar negeri negara untuk memenuhi mengubah situasi di Korea Utara, ekonomi Jepang bisa tumbuh pesat dan Korea Selatan yang bisa mencapai kemakmuran, Adanya keterbelakangan dari masyarakat Korea Utara menjadi faktor adanya reunifikasi Korea yang menjadi kepentingan nasional negara tersebut. Warga Korea Utara yang berpendidikan tinggi-pun tidak akan memahami kecepatan teknologi dan teori yang berkembangan di dunia internasional karena pemerintahan Korea Utara menutup akses dunia luar untuk masuk ke negaranya. Selain itu permasalahan kelaparan yang melanda masyarakat Korea Utara sering terjadi. Puncaknya pada tahun 1955-1999 korban dari bencana kelaparan ini telah merengut total tiga juta rakyat Korea Utara (Chol,2001:125).

Upaya perdamaian telah ada sejak pada tahun 1990 ketika Korea masih di pimpin oleh Kim Young San yang memimpin korea pada periode (1993-1998) berbagai upaya pun telah dilakukan demi meningkatkan sebuah hubungan kerjasama ekonomi antar dua Korea ini. Korea Selatan pun mengajukan sebuah reuni untuk keluarga yang terpisah begitu sebaliknya untuk Korea Utara yang menginginkan bantuan kemanusiaan kepada negara saudaranya tersebut upaya reunifikasi juga bertujuan untuk menghindari konflik dengan kekerasan ataupun peperangan antar dua Korea. Dan keberhasilan dari reunifikasi Jerman pada tahun 1990 menyebabkan presiden Kim Dae Jung ingin juga membuat agar reunfikasi di semenanjung Korea bisa berhasil juga dilaksanakan. Sejak dicanangkan kebijakan terhadap Korea Utara pemerintah Kim Dae Jung pada tahun 1998 yang disebut sebagai *sunshine policy* (Young-sun,2001:10).

Pemerintah Kim Dae Jung mengijinkan pelaku bisnis di Korea Selatan untuk bekerjasama dengan Korea Utara dalam bidang produksi. Kerjasama ekonomi dilakukan agar produktivitas dan efisiensi kerjasama ekonomi antar Korea dapat meningkat. Bantuan ekonomi termasuk bantuan makanan dan pupuk, merestrukturisasi sektor pertanian Korea Utara, mengkonstrukturisasi kembali infrastruktur, menyelesaikan masalah listrik, mendukung investasi yang dilakukan perusahaan-perusahaan swasta Korea Selatan serta memberi jaminan investasi bagi pelaku bisnis Korea Selatan, menghindari pajak yang terlalu tinggi, dan menghindari perselisihan ekonomi (Fathimatuzzahrah,2012:7).

13 Juni 2000 Awal adanya upaya dalam reunifikasi Korea ini dicetuskan pada KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) melalui kesepakatan antara Korea Utara

dan Korea Selatan dalam Konferensi Tingkat Tinggi antar-Korea pada tahun 2000. pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Antar-Korea 13-15 Juni 2000 telah ditandatangani deklarasi bersama Korea Selatan-Korea Utara (*South-North Joint Declaration*) dilakukan pada tanggal 15 Juni tahun 2000 yang dikenal dengan nama *June 15th North–South Joint Declaration* / *공동선언*.

Isi dari *June 15th North–South Joint Declaration* sebagai upaya usulan reunifikasi Korea Selatan – Korea Utara di bawah pemerintahan yang satu isi dari *June 15th North–South Joint Declaration* itu adalah :

1. Korea Selatan dan Korea Utara telah sepakat untuk menyelesaikan masalah reunifikasi secara independen dan melalui upaya dari orang-orang Korea yang adalah tuan dari negara.
2. Untuk pencapaian reunifikasi, kami telah sepakat bahwa adanya hal umum elemen dalam Konsep Korea Selatan konfederasi dan Kelonggaran Korea Utara untuk membentuk federasi. Korea Selatan dan Korea Utara setuju untuk mempromosikan reunifikasi.
3. Korea Selatan dan Korea Utara telah sepakat untuk segera menyelesaikan isu - isu kemanusiaan seperti pertukaran kunjungan anggota keluarga,kerabat yang terpisah, pada kesempatan 15 Agustus Hari Pembebasan Nasional Hari dan pertanyaan dari teguh Komunis menjalani hukuman penjara di Korea Selatan
4. Korea Selatan dan Korea Utara telah sepakat untuk mengkonsolidasikan saling percaya dengan mempromosikan keseimbangan pembangunan nasional ekonomi melalui kerjasama ekonomi dan merangsang kerjasama

pertukaran di masyarakat, budaya, olahraga, kesehatan, lingkungan dan semua bidang lainnya.

5. Korea Selatan dan Korea Utara telah sepakat untuk terus dialog antara otoritas yang relevan dalam waktu dekat untuk melaksanakan atas perjanjian secepatnya.

Pada tanggal 15 Juni 2000 Korea Utara – Korea Selatan deklarasi Bersama diadopsi antara pemimpin Korea Utara dan Selatan pada Juni tahun 2000 setelah berbagai pertemuan diplomatik antara Korea Utara dan Korea Selatan keduanya setuju untuk mencapai reunifikasi yang damai pada masa depan. Sebagai hasil dari pembicaraan, banyak keluarga yang terpisah dan kerabat dari Utara dan Selatan mengadakan pertemuan dengan anggota keluarga mereka di Pyongyang dan Seoul. Menurut Korea Utara – Korea Selatan Deklarasi Bersama, pembicaraan tingkat menteri ini Korea Utara – Korea Selatan dan perundingan tingkat kerja militer ini Korea Utara – Korea Selatan yang diadakan empat kali di Pyongyang, Seoul dan Pulau Jeju dari Juli hingga Desember 2000. kontak tingkat kerja untuk Korea Utara dan kerjasama ekonomi Korea Selatan dilakukan beberapa kali.

Pembicaraan dan kesepakatan Palang Merah Korea Utara yang pertama dan pembicaraan kedua menteri. perkembangan dalam hubungan antar Korea setelah pertemuan puncak bulan Juni. Palang Merah Korea Utara bertemu di 27-30 Juni 2000 dengan palang merah Korea Selatan untuk bernegosiasi rincian kesepakatan mencapai dalam deklarasi Bersama untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan yang terjadi di Korea (Taehwan,14:2000).

Hubungan Korea Selatan dan Korea Utara pun terlihat sangat baik telihat pada pesta *Asian Games* yang diadakan di korea selatan pada tahun 2002 kedua delegasi Korea Selatan & Korea Utara tidak hanya sepakat untuk meggunakan bendera reunifikasi tapi juga sepakat mengadakan pawai bersama dalam acara akbar tersebut. Dan pada tahun 2006 delegasi Korea Selatan dan Korea Utara sepakat untuk membentuk tim kesatuan atau tim tunggal untuk *Asian Games* tahun 2006 di Doha, Qatar dan Olimpiade musim panas 2008 di Beijing, Tiongkok. Hal tersebut merupakan kemajuan yang sangat berarti menuju rekonsiliasi, dan kerja sama melalui olah raga. Sejak itu kedua belah pihak sering membentuk tim tunggal untuk mengikuti berbagai pertandingan olah raga internasional, termasuk *Asian Games* di Busan Korea Selatan tahun 2002 dan olimpiade Atena tahun 2004 yang mendorong tercapainya persetujuan pembentukan tim tunggal antar Korea untuk Asian Games 2006 di Doha dan untuk olimpiade musim panas tahun 2008 di Beijing (http://world.kbs.co.kr/indonesian/archive/program/news_issue.htm?no=5649 diakses pada 17 Mei 2016).

Dalam pertemuan konferensi Tingkat Tinggi Antar-Korea 13-15 Juni 2000 telah ditandatangani Deklarasi Bersama Korea Selatan-Korea Utara (*South-North Joint Declaration*) yang diharapkan dapat menjadi landasan utama bagi babak baru hubungan antar Korea dengan melaksanakan kerjasama di berbagai bidang. Salah satu bentuk kerjasamanya adalah di bidang ekonomi dimana Korea Utara menyediakan beberapa distrik ekonomi khusus (*Special Economic Zone/SEZ*) untuk dijadikan komplek industri, yaitu Gaesong, Shinuju, dan

Najin/Sonbong. Penetapan Komplek Industri Kaesong sebagai salah satu zona ekonomi khusus bukan hanya menjadi simbol persatuan Korea tetapi juga menandai sebuah upaya membangun hubungan antar Korea yang akan mengarah pada percepatan proses reunifikasi secara damai kedua Korea. Kaesong adalah kompleks perindustrian di wilayah Korea Utara dan dikelola oleh *Hyundai Asian Corporation* yang merupakan salah satu *chaebol*(sebutan orang kaya di Korea) di Korea Selatan. Investasi yang dilakukan Korea Selatan ini tergolong sebagai bentuk investasi asing langsung (*foreign direct investment*) karena Korea Selatan di samping sebagai penanam modal (Moren,2011:7).

Bagi Korea Selatan, keberadaan Komplek Industri Kaesong ini bukan hanya dapat membantu perekonomian Korea Utara, tapi Kaesong juga merupakan sebuah faktor utama dalam pembangunan dan mereformasi ekonomi Korea Utara yang menuju ke arah terciptanya reunifikasi kedua Korea. Secara demikian, dapat dimaknakan bahwa eksistensi Komplek Industri Kaesong ini sangat menguntungkan Kedua pihak, terutama bagi pemulihan ekonomi Korea Utara. Apalagi dalam makro strategi Gaesong memiliki makna baik ekonomi (pembangunan industri) maupun politik (reunifikasi korea)

Dalam kerjasama di bidang industri Korea Selatan dan Korea Utara sepakat untuk kerjasama menyepakati kerjasama di bidang industri ringan dimana Korea Utara memberikan sumberdaya alamnya. Pada pertemuan tingkat-kerja kedua belah pihak mencapai kesepakatan harga sejumlah jenis barang. Korea Utara sepakat menerima bahan baku dengan standar harga Korea Selatan dan akan membayar biaya transportasi, penanganan kargo dan biaya kelebihan

waktu berlabuh sedangkan Korea Selatan akan menanggung seluruh biaya pengapalan, asuransi dan jasa pelabuhan.Proyek pertukaran kali ini akan berbeda dari berbagai proyek kerjasama ekonomi antar Korea sebelumnya yang lebih banyak bersifat bantuan sepihak kepada Korea Utara. Proyek yang telah disepakati ini akan menguntungkan kedua belah pihak dan merupakan kerjasama berkelanjutan yang diharapkan tidak hanya menjadi babakan baru kerjasama ekonomi kedua Korea, melainkan juga keseluruhan hubungan antar Korea (http://world.kbs.co.kr/indonesian/archive/program/news_issue.htm?no=10338&current_page=110 diakses pada 17 Mei 2016).

Dari bagian wisata Korea Utara telah menawarkan untuk membuka program wisata gunung Baekdu dan kota bersejarah Gaesong terhadap Korea Selatan. Pengembangan kedua program wisata itu diharapkan benar-benar akan membuka era wisata Korea Utara. Keputusan Korea Utara untuk membuka lebih banyak program wisata untuk wisatawan dari Korea Selatan itu, merupakan usaha mengembangkan pariwisata untuk meningkatkan perekonomian dan meningkatkan hubungan diplomatik antar Korea. Para wisatawan menuju gunung Baekdu dapat terbang langsung ke pelabuhan udara Samjiyeon dekat gunung Baekdu bisa juga terbang langsung ke Pyongyang Korea Utara atau dari Korea Selatan melalui jalan darat. Hyundai Asan telah membangun landasan proyek kerjasama antar Korea, melalui program wisata gunung Geumgang. Korea Utara akan memperoleh keuntungan dan bisa mengembangkan pembangunan prasarana wisata tersebut dan juga meningkatkan hubungan antar Korea(http://world.kbs.co.kr/indonesian/archive/program/news_issue.htm?no=4

819 diakses pada 17 Mei 2016).

Korea Selatan dan Korea Utara telah sepakat untuk membuka hubungan jalan darat dan jalur rel kereta api antar Korea kedua Korea setuju untuk memulai uji coba keamanan operasional rel kereta api yang mehubungkan daerah perbatasan antar Korea, uji coba terhadap prasarana seperti signal dan kelancaran komunikasinya dan secara resmi akan membuka jalur jalan darat antar daerah perbatasan tersebut. Ada 2 jalur rel kereta api yang melewati daerah demarkasi militer antar Korea, yakni Jalur pantai barat yang menghubungkan Seoul dengan Pyongyang dan jalur pantai timur disebut jalur Donghae melalui gunung Geumgang Korea Utara.

Korea Selatan telah memulai untuk membangun jalan dan rel kereta api yang ditujukan untuk menghubungkan kedua Korea sejak bulan September tahun 2000, Sementara itu Korea Utara juga membangun jalan dan rel kereta api untuk saling disambung antar Korea, dan saat ini sedang membangun fasilitas stasiunnya.Penyambungan rel kereta api dan jalan darat itu tentu akan mempererat hubungan antar Korea, dan secara khusus akan memperlancar kerja sama ekonomi di kawasan industri Gaesong dan program wisata gunung Geumgang dan juga hubungan dagang antara kedua belah pihak.

Penyambungan rel kereta api dan jalur jalan raya antar Korea itu bernilai tinggi terhadap perekonomian kedua belah pihak, akses jalan berdampak pada banyaknya keuntungan yang didapat oleh kedua negara Korea, di antaranya :

1. Mengurangi biaya pengiriman logistik.
2. Mengurangi ketegangan yang terjadi antar Korea.

3. Mempercepat perkembangan proyek Taman Industri Kaesong.
4. Membuka pariwisata gunung Geumgang di Korea Utara yang mampu menambah pendapatan devisa Korea Utara.

Penyambungan rel kereta api dan jalan darat itu tentu akan mempererat hubungan antar Korea, dan secara khusus akan memperlancar kerja sama ekonomi di kawasan industri Gaesong dan program wisata gunung Geumgang dan juga hubungan dagang antara kedua belah pihak (http://world.kbs.co.kr/indonesian/archive/program/news_issue.htm?no=4926 diakses pada 17 Mei 2016).

Selain adanya hubungan bilateral dari segi ekonomi yang dilakukan antar Korea di bentuk juga kementerian reunifikasi yang bertugas untuk menangani hubungan bisnis kedua korea serta komunikasi kedua korea. Korea Utara – Korea Selatan membuat *website* yang khusus menaungi tentang upaya reunifikasi ini dengan nama www.unikorea.go.kr dijelaskan apa saja hal yang dilakukan kedua negara ini untuk melakukan reunifikasi dan juga bagaimana hubungan kedua negara ini dalam mengupayakan reunifikasi dan beberapa prinsip kebijakan reunifikasi pun di tulis seperti pada laman *South-North Relations* yang di dalamnya ada beberapa poin tentang Kunci dasar dalam perjanjian selatan – utara yaitu : Kedua belah pihak harus menghindari penggunaan kekuatan militer, damai menyelesaikan konflik, menghormati perbatasan didefinisikan oleh perjanjian gencatan senjata dan wilayah di mana masing-masing pihak telah melakukan kontrol nyata dan membuka *hot line militer* dan Kedua belah pihak akan bekerja sama di sektor ekonomi dan sosial, memungkinkan kontak gratis, wisata dan

pertukaran pos, mengatur reuni keluarga yang terpisah oleh Perang Korea, dan menyambung kembali jalur kereta api dan jalan. Pada tahun 2012 Pemerintah Korea Selatan melakukan program dukungan pendidikan pemuda pengungsi Korea Utara.

Aktivitas yang dilakukan antar Korea pun sampai pada tahap pendidikan antar Korea dimana Pada tahun 2012, pemerintah Korea Selatan dipilih dan ditempatkan 15 koordinator disekolah dan wilayah dihuni oleh sejumlah besar pemuda Korea Utara. koordinator ini membantu orang muda untuk hidup stabil dengan mengkoordinasikan dukungan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Selain mendukung para pemuda di sekolah, pemerintah juga berjuang untuk membantu mereka untuk belajar mandiri di rumah melalui Korea Utara Pengungsi *Foundation*. Pemerintah juga membantu pemuda Korea Utara dalam keadaan khusus untuk mencapai pendidikan mereka (Kementerian Budaya, Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan, 2013:192).

Setelah memasuki Korea Selatan, pengungsi dari Korea Utara menerima orientasi sosial dasar di Pusat Dukungan Settlement untuk Pengungsi Korea Utara di Hanawon Korea Selatan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa peserta mendapatkan kembali stabilitas emosional mereka, mengatasi perbedaan budaya, dan termotivasi untuk menjadi sosial dan mandiri secara ekonomi. Korea Selatan banyak melakukan program untuk Korea Utara terlebih pada pengungsi Korea Utara yang datang ke Korea Selatan yang dinamakan “Dasar Program Orientasi Sosial” yang bergerak dalam bidang pendidikan,kesehatan, Korea Selatan-pun menyelenggaraan *job fair* untuk para pengungsi Korea Utara setiap bulan untuk

mencari pekerjaan di perusahaan kecil atau menengah Acara menghadapkan peserta untuk proses kerja, membantu mereka mengatasi rasa takut berhubungan dengan pekerjaan dan membuat keputusan sendiri. Sebagai tambahan untuk *job fair*, kunjungan yang diselenggarakan untuk membiasakan peserta dengan budaya kerja di Korea Selatan. Antara Januari 2010 dan Desember 2012, total 4.800 pengungsi Korea Utara berpartisipasi dalam *job fair* dan total 1.632 pengungsi menerima surat kerja mereka pada lewat wawancara mereka. Di antara mereka, 312 orang, atau 19,1%, mengambil pekerjaan yang ditawarkan (*Ministry of unification*, 2013:172).

Kemajuan reunifikasi Korea pada tahun 2014 reunifikasi melibatkan kegiatan untuk menggalang dukungan internasional dan kerja sama melalui pesan bahwa penyatuan ini bermanfaat bagi negara-negara sekitarnya dan akan memberikan kontribusi bagi kemakmuran dan perdamaian di Timur Asia dan dunia. diplomasi unifikasi didasarkan pada premis bahwa kedua Korea, sebagai aktor utama, harus mengambil inisiatif untuk unifikasi, tetapi kerjasama negara-negara sekitarnya dan masyarakat internasional penting dalam proses tersebut. Dalam hal ini, pemerintah Korea Selatan bekerja untuk memperkuat kerja sama dengan masyarakat internasional mengenai hal-hal mengenai kebijakan unifikasi dan untuk meningkatkan cara negara-negara lain mempertimbangkan masalah unifikasi. Upaya telah termasuk kunjungan ke negara-negara tetangga dan pertemuan dengan pemerintah pejabat, seminar tentang isu-isu Semenanjung Korea. Konsultasi pun dilakukan Korea Selatan untuk mempelajari reunifikasi Jerman Melalui konsultasi tingkat tinggi, Menteri Unifikasi mengunjungi negara-

negara tetangga dan bertemu dengan para pejabat pemerintah daerah dan anggota parlemen untuk bertukar pandangan tentang kebijakan unifikasi dan Korea Utara dan mengumpulkan mereka dukungan aktif.

Hambatan yang jadi penghalang untuk reunifikasi korea Keluarnya tentara Amerika Serikat di Korea Selatan, menurut Wakil Ketua Komite Khusus Reunifikasi, Chong Wook Chung, mengatakan Korea Selatan masih sangat sulit untuk menyanggupi beberapa persyaratan yang dituntut oleh negara yang dipimpin oleh Kim Jong Un tersebut. Korea Utara meminta agar tentara Amerika Serikat ditarik, sehingga tidak lagi berada di Korea Selatan, khususnya wilayah perbatasan semenanjung. Hal itu sulit untuk korea selatan lakukan (http://www.viva.co.id/tag/reunifikasi-dua-korea di akses pada 25 Februari 2016).

Menurut Chong Wook Chung, pasukan tentara Amerika Serikat sudah berada di Korea Selatan sejak 1948 dan sempat keluar karena adanya gencatan senjata. Tapi, pasukan Amerika Serikat kembali lagi hingga saat ini karena terjadinya perang dan ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Karena adanya perang yang terjadi lagi di semenanjung Korea, maka pasukan tentara Amerika Serikat kembali ke Korea Selatan. Korea Utara menuntut agar reunifikasi dilakukan secara militer, dan menolak untuk melakukan reunifikasi secara damai. Sebenarnya jika terjadi reunifikasi secara damai maka sektor perekonomian mereka akan tidak seimbang karena bergabung dengan Korea Selatan, mereka akan mengalami kerugian. Karena itu Korea Selatan minta agar Korea Utara mencontoh dan mempelajari Jerman saat melakukan reunifikasi (http://www.merdeka.com/dunia/kunci-reunifikasi-korea-ada-di-korea-utara.html

diakses pada 24 Februari 2016).

Menurut data kementerian unifikasi Korea jika unifikasi Korea terwujud maka banyak hal yang bisa terjadi seperti, Jika unifikasi tercapai generasi muda Korea bisa bebas dari senjata nuklir dan ancaman perang. Memberi peluang dan harapan kepada banyak kalangan, jumlah penduduk dua Korea akan menjadi 80 juta orang. Kekuatan ekonomi dan teknologi dari Korea Selatan bergabung dengan sumber daya alam dan tenaga kerja Korea Utara akan membuat penyatuan Korea menjadi *blue ocean* bagi generasi masa depan. Lapangan kerja bagi generasi muda dan jenis kerja akan meningkat, dan mereka dapat memiliki impian besar dengan masa depan lebih beragam dan kreatif dari peluang itu.

Menjadi negara yang kuat dalam pariwisata yang dikunjungi masyarakat dunia. Kalangan tua bisa mewujudkan keinginan terakhir jika unifikasi tercapai, kalangan tua yang menjalani kehidupan sambil meneteskan air mata karena kerindauan terhadap keluarga yang terpisah di Korea Utara akan bisa bertemu dengan keluarga di sana. Mereka bisa menginjakkan kaki kembali di kampung halaman di Korea Utara.

HAM (Hak Asasi Manusia) warga Korea Utara terjamin, dan mereka dapat memiliki peluang ikut di dunia politik secara bebas.Kekuatan keamanan diplomatik yang dihabiskan akibat konflik dan konfrontasi antara Korea Selatan dan Korea Utara bisa dimanfaatkan secara produktif untuk menjaga perdamaian dunia dan kemakmuran bersama di Asia Timur (http://world.kbs.co.kr/special/kdivision/indonesian/unification/unification.htm di akses pada 1 Mei 2016).

Di sisi lain usaha untuk reunifikasi korea di lakukan pada pemerintahan preside Park Geun Hye, Pada Tahun 2014 Presiden Park Geun hye mendeklarasikan “Gagasan Unifikasi Damai Semenanjung Korea” di Dresden yang merupakan lokasi simbol penyatuan Jerman pada tanggal 28 Maret tahun 2014. Menurut Park Geun-Hye Saat ini, Korea Selatan dan Korea Utara harus meningkatkan kerja sama. Kita membutuhkan kerja sama dan pertukaran yang saling membantu masyarakat dua Korea untuk memulihkan kesamaan, bukan pertukaran yang hanya sekali saja. Proses Membangun Kepercayaan Semenanjung Korea. Selain itu, langkah tersebut adalah salah satu kebijakan pembentukan landasan unifikasi damai’ yang merupakan salah satu dari 4 tonggak kebijakan negara pemerintahan Park Geun-hye itu adalah :

1. Solusi Masalah Kemanusiaan Antara Warga Dua Korea : Reuni keluarga terpisah reguler, Peningkatan bantuan kemanusiaan kepada warga Korea Utara termasuk anak balita dan ibu hamil.
2. Pemulihan Kesamaan Bangsa Antara Dua Korea : Peningkatan kontak antara warga dua Korea, Peningkatan pertukaran sipil di bidang penelitian sejarah, seni dan budaya, olahraga, dan lain-lain. Dukungan pengembangan ekonomi Korea utara, pendidikan finansial, dan lain-lain.Penelitian bersama program pendidikan demi generasi masa depan
3. Pembentukan Infrastruktur Hajat Kehidupan untuk Kemakmuran Bersama Dua Korea : Bermanfaat bagi kemakmuran bersama di Asia Timur termasuk warga dua Korea, Dukungan perlengkapan atau

pembentukan infrastruktur kehidupan rakyat dan sosial dan pengembangan sumber daya bumi di Korea Utara.

Upaya yang dilakukan pemerintahan Park Geun Hye ini demi terlaksananya pelaksanaan reunifikasi Korea. karena menurutnya Pelaksanaan unifikasi di Semenanjung Korea yang bermanfaat bagi dunia internasional dan harmonis dengan negara-negara tetangga, Unifikasi sebagai Visi Pengembangan Negara untuk memajukan sejarah melalui unifikasi dan menjadi negara kuat di dunia internasional seperti halnya Jerman (http://world.kbs.co.kr/special/kdivision/indonesian/tasks/dresden.htm di akses 1 Mei 2016).

Perbedaan idieologi,politik dan ekonomi membuat masih jadi penghambat lancarnya jalan reunifikasi Korea ini. Kebijakan untuk upaya reunifikasi Korea yang di jalankan oleh beberapa presiden Korea Selatan masih berlanjut dan masih tetap menjadi agenda yang harus di laksanakan oleh kedua Korea, kebijaksanaan reunifikasi Korea adalah untuk mengangkat perdamaian dan kebebasaan tetapi berlawanan dengan Korea Utara yang ingin menyatukan Korea di bawah kekuatan Komunisme yang berbeda idieologi dengan Korea Selatan yang memegang ideologi liberal kapitalisme.

Kesimpulan penelitian ini menunjukan bahwa Korea Selatan dan Korea Utara masih dalam upaya reunifikasi masih ada keinginan dari pihak Korea Selatan agar Korea Utara bisa kembali bersatu dan menjadi satu Korea, masih adanya negosiasi yang dilakukan oleh Korea Selatan terus menerus untuk usaha dalam mewujudkan reunifikasi Korea dengan damai.

Ada beberapa penelitian di mana analisanya adalah tentang dinamika hubungan Korea Selatan dan Korea Utara terkait pembatalan Reunifikasi Korea oleh Korea Utara, Dari penelitian yang berjudul "*MASA DEPAN REUNIFIKASI KOREA (Dinamika Hubungan Korea Utara-Korea Selatan dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Keamanan di Kawasan Asia Timur Pasca Perang Dingin)"* Jurnal karya Mega Aldikawati. Penelitian tersebut mengemukakan bahwa Dinamika hubungan Korea Utara dan Korea Selatan mempengaruhi konstatasi dan konstelasi politik, termasuk stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur.Kedua Korea melakukan interaksi dan kerjasama dengan Jepang, Cina, Amerika, dan Rusia yang mempunyai keterkaitan dengan pecahnya Korea menjadi dua pada masa Perang Dingin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka untuk menganalisa dinamika hubungan antar-Korea serta prospek dan masa depan reunifikasi Korea.

Penelitian kedua yang berjudul " *Upaya Reunifikasi Korea (Studi tentang pemerintahan presiden Kim Dae Jung di Korea Selatan tahun 1998-2003)*" Jurnal karya Dessy Fathimatuzzahrah. penelitian tersebut mengemukakan bahwa Kim Dae Jung yang menjadi presiden Korea Selatan pada tahun 1998-2003 mencanangkan adanya dicanangkan kebijakan *engangement* terhadap Korea Utara pemerintah Kim Dae Jung pada tahun 1998 yang disebut sebagai *sunshine policy*, pemerintah Korea Selatan memiliki visi untuk mencapai proses reunifikasi Korea secara damai melalui dialog dan bantuan ekonomi. Visi tersebut didasari oleh keyakinan positif dari pihak Korea Selatan bahwa pemerintah Korea Utara sedang berada dalam proses perubahan untuk menjamin eksistensinya dan dari pihak

Korea Selatan percaya bahwa kebijakan engangement yang dicanangkan Korea Selatan akan memberikan hasil yang positif Proses reunifikasi Jerman tahun 1990 lalu mengilhami Presiden Kim Dae Jung untuk mengupayakan agar reunifikasi terjadi di Semenanjung Korea. Kim Dae Jung yang selalu berupaya memprioritaskan pemulihan hubungan bilateral antara Korea Utara dan Korea Selatan. Kim Dae Jung juga memiliki komitmen jelas terhadap unifikasi bahkan, sejak isu unifikasi masih sangat sensitif di Korea Selatan. Kim Dae Jung mengangkat persoalan penggabungan kembali Korea pertama kali tahun 1971 ketika menentang Park Chung Hee dalam pemilihan presiden. Keinginan untuk mengadakan reunifikasi Korea juga didorong oleh pribadi Kim Dae Jung sendiri. Selain itu, keinginan untuk mengadakan reunifikasi Korea juga didorong oleh pribadi Kim Dae Jung yang konsisten, cinta damai, dan ambisius.

Lalu penelitian ketiga yang berjudul *"Dinamika hubungan Korea Selatan - Korea Utara dalam mewujudkan reunifikasi di semenanjung Korea periode 2003-2008"* skripsi karya Lilis Widyasari, Hubungan Internasional, FISIP Universitas islam negeri syarif hidayatullah Jakarta. Penulis menyatakan hubungan Korea periode 2003-2008 telah mengalami dinamika yang cukup rumit. Dengan adanya kiri nuklir kedua pada tahun 2003 dan permasalahan antara Korea Utara dengan Amerika Serikat membuat posisi Korea Selatan serba salah. Sejak 2003 permasalahan itu telah diupayakan penyelesainnya melalui mekanisme pertemuan enam pihak yang melibatkan Amerika Serikat,Jepang,Rusia dan RRC di samping Korea Selatan dan Korea Utara. Dalam rangka penyelesaian berbagai masalah di semenanjung Korea, pertemuan puncak inter-Korea itu perlu

menghasilan tawaran atau proposal bersifat konkret. Di antaranya solusi menyangkut masa depan reunifikasi.

Lalu penelitian keempat yang berjudul "*Pengaruh doktrin Bush terhadap proses reunifikasi Korea*" skripsi karya Nifoarota Laowo, Hubungan Internasional, FISIP Universitas komputer Indonesia Bandung. Penulis menyatakan pengaruh dari Doktrin Bush untuk proses Korea reunifikasi Doktrin Bush didasarkan pada State of the Union di 29 Januari 2002 dan Keamanan Nasional strategi 20 September 2002. yang mengkategorikan Korea Utara sebagai "*axis of evil*" yang menjadi polemik saat meningkatnya dan akan realisasi reunifikasi pada masa presiden Kim Dae Jung yang membawa kebijakan *Sunshine policy.* Karakter pemerintahan George Walker Bush, yang mengabaikan itikad politik Korea Selatan untuk menjaga perdamaian dan mencapai tujuan akhir reunifikasi, yang justru lebih memilih untuk melakukan tekanan politik dan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara, mengakibatkan ide reunifikasi Semenanjung Korea terus berada pada kondisi kebuntuan yang disertai dengan meluasnya anti-Amerikanisme di Korea Selatan.

Dari penelitian yang berjudul *MASA DEPAN REUNIFIKASI KOREA (Dinamika Hubungan Korea Utara-Korea Selatan dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Keamanan di Kawasan Asia Timur Pasca Perang Dingin)"* Jurnal karya Mega Aldikawati. memiliki persamaanya membahas objek penelitian yang sama yaitu membicarakan tentang reunifikasi Korea dan perbedaannya adalah penelitian hanya fokus pada upaya reunifikasi korea setelah penandangantangan *June 15th North–South Joint Declaration* pada tahun 2000 dan kelanjutan upaya

reunifikasi setelah penandatanganan itu. Pada penelitian kedua *"Upaya Reunifikasi Korea (Studi tentang pemerintahan presiden Kim Dae Jung di Korea Selatan tahun 1998-2003)"* Jurnal karya Dessy Fathimatuzzahrah memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti teliti, persamaanya adalah membahas tentang reunifikasi dan bagaimana usaha - usaha reunifikasi, dan perbedaanya adalah penelitian oleh beliau tidak membahas tentang apa yang terjadi setelah masa kepemerintahan Kim Dae Jung selesai dan hanya terfokus pada masa pemerintahan Kim Dae Jung. Selanjutnya dari penelitian ketiga *"Dinamika hubungan Korea Selatan - Korea Utara dalam mewujudkan reunifikasi di semenanjung Korea periode 2003-2008"* oleh Lilis Widyasari memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang teliti, persamaannya adalah membahas dan perbedaanya beliau tidak membahas kelanjutan upaya reunifikasi setelah tahun 2008. Selanjutnya dari penelitian keempat "*Pengaruh doktrin Bush terhadap proses reunifikasi Korea*" skripsi karya Nifoarota Laowo, memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti proses reunifikasi Korea dari awal kebijakan presiden Kim Dae Jung dan perbedaanya penulis hanya membahas terhambatnya proses reunifikasi Korea yang terpengaruh karena presiden Bush menyebut Korea Utara sebagai *"axis of evil"* dan membahas proses reunifikasi pada masa presiden Kim Dae Jung.

Berdasarkan berbagai upaya yang dilakukan untuk upaya dalam mewujudkan adanya reunifikasi Korea ini dan pengaruhnya terhadap kedua Korea maka peneliti tertarik untuk mengkaji, mencermati dan mempelajari fenomena tersebut sebagai bahan penelitian dengan mendeskripsikan melalui judul

"**HUBUNGAN KOREA SELATAN – KOREA UTARA PASCA KESEPAKATAN REUNIFIKASI TAHUN 2000"** Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa mata kuliah yang dipelajari peneliti di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. Antara lain sebagai berikut:

1. Hubungan Internasional di Asia Timur, merupakan landasan dalam mempelajari karakteristik Korea Selatan memberikan pengetahuan tentang berbagai situasi politik internasional yang terjadi di Korea Selatan
2. Studi Keamanan Internasional, merupakan dasar pemikiran dalam mengkaji sengketa dan konflik dalam keamanan Internasional. memberikan pemahanan tentang bagaimana situasi keamanan yang ada dalam setiap situasi konflik politik yang dimana ancaman sering sekali muncul dari luar seperti ancaman militer, politik, sosial, ekonomi di wilayah Korea Selatan dan Korea Utara.
3. Analisis Politik Luar Negeri, sebagai Acuan dasar bagi peneliti dalam memahami politik luar negeri suatu negara dan mengkaitkannya dalam masalah penelitian ini.
4. Diplomasi dan Negosiasi, sebagai acuan dalam meneliti bagaimana cara Korea Selatan bernegosiasi dengan Korea Utara. dan mengkaitkannya dalam subjek penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakan yang sudah dipaparkan sebelumnya,maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan pada latar belakang masalah untuk memudahkan peneliti dalam melakukan pembahasan,peneliti merumusakan masalah sebagai berikut: **"Bagaimana hubungan Korea Selatan – Korea Utara pasca kesepakatan reunifikasi tahun 2000?"**

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Rumusan masalah mayor yang kemudian diturunkan menjadi rumusan minor, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan Korea Selatan – Korea Utara sebelum rencana reunifikasi tahun 2000 disepakati ?
2. Kerjasama apa yang disepakati oleh kedua negara pasca kesepakatan untuk reunifikasi tahun 2000 disepakati ?
3. Bagaimana perubahan hubungan kedua negara pasca rencana reunifikasi disepakati ?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ditujukan untuk mempersempit fokus terhadap masalah yang terjadi pada tahun 2000-2015. Perbedaan ideologi antara Korea Selatan dan Korea Utara pada tahun 1953 membuat hubungan kedua Korea menjadi tidak baik sehingga akhinya Upaya reunifikasi pun di sepakati oleh Korea

Utara dan Korea Selatan dalam KTT antar Korea pada tahun 2000 yang menyatukan kembali Kedua Korea menjadi negara baru yaitu negara Korea bersatu dan presiden Korea Selatan dan Presiden Korea Utara menandatangani *June 15th North–South Joint Declaration* dimana kedua negara setuju untuk mencapai reunifikasi yang damai pada masa depan.

Hubungan kedua Korea pun mulai membaik karena adanya kerjasama yang dilakukan oleh kedua Korea seperti pembangunan rel kereta antar Korea, Kerjasama dalam bidang industri, pengembangan wisata antar Korea sampai pembentukan tim olah raga kesatuan Korea yang menyatukan pada atlit kedua Korea bersatu. Yang membuat adanya perbaikan hubungan bilateral antar dua Korea dan demi terciptanya reunifikasi Korea kedepannya.

Keinginan Korea Selatan untuk reunifikasi sendiri adalah untuk menghindari Konflik dengan kekerasan ataupun peperangan. Dan juga Korea Selatan pun mengajukan sebuah reuni untuk keluarga yang terpisah karena perang Korea yang terjadi pada tahun 1950-1953. Sedangkan dari Korea Utara tujuan untuk melakukan reunifikasi ini adalah untuk Keinginan masyarakat Korea Utara untuk maju tapi masih terhalang karena Korea Utara menutup akses dunia luar untuk masuk ke negaranya. Presiden Kim jong il yang menekankan perlunya mengembangkan perdangan luar negeri untuk mengubah situasi di Korea Utara. Selain itu permasalahan kelaparan yang melanda masyarakat Korea Utara sering terjadi. Puncaknya pada tahun 1955-1999 yang membuat Korea Selatan Peristiwa seperti kekeringan berkepanjangan diikuti oleh banjir telah menghancurkan produksi pertanian Korea Utara. Hilangnya dukungan dari Tiongkok telah

menciptakan pengurangan besar dalam industri di Korea Utara,. Korea Utara telah mulai untuk melihat ke luar dan salah satu langkah positif pertama menuju reunifikasi datang pada tahun 2000. Tahun 2014 pada pemerintahan presiden Park Geun Hye masih terus melakukan upaya unifikasi pada masa pemerintahannya Presiden Park Geun Hye mendeklarasikan gagasan Unifikasi Damai Semenanjung Korea di Dresden Jerman yang merupakan lokasi simbol penyatuan Jerman pada tanggal 28 Maret tahun 2014. Dan pada tahun 2015 Korea Selatan terus melakukan usaha pertemuan terkait reunifikasi Korea tetapi Korea Utara masih belum menanggapi lagi keinginan Korea Selatan untuk membicarakan reunifikasi Korea.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Bagaimana Hubungan Korea Selatan - Korea Utara pasca kesepakatan untuk reunifikasi tahun 2000.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana hubungan Korea Selatan – Korea Utara sebelum rencana reunifikasi tahun 2000 disepakati.
2. Untuk mengetahui kerjasama apa yang disepakati oleh kedua negara pasca kesepakatan untuk reunifikasi tahun 2000 disepakati.
3. Untuk mengetahui bagaimana perubahan hubungan kedua negara pasca rencana reunifikasi disepakati.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai Hubungan Internasional di Asia Timur, mengenai fenomena kerjasama bilateral yang dilakukan antara Korea Selatan dan Korea Utara, penelitian ini di harapkan, akan memperoleh dan menambah pengetahuan peneliti mengenai teori-teori yang berhubungan dengan masalah internasional serta melatih kemampuan berpikir dan menganalisis suatu permasalahan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Sebagai dedikasi peneliti dalam memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat dunia juga bagi bangsa dan Negara Indonesia sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan rujukan bagi mereka yang membutuhkan.
2. Sebagai bahan referensi bagi penstudi Ilmu Hubungan Internasional dan umum.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam menempuh ujian strata-1 (S1) pada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Komputer Indonesia.